

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERLAKUAN PERATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM *FREE TRADE ZONE* DI WILAYAH KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU

Oleh:

Hendra Wijaya

(Pembimbing Skripsi: Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M. Ph.D.)

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib di wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) Kota Batam, Kepulauan Riau. Selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia mainan secara wajib bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam wilayah FTZ di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah kombinasi antara metode normatif dan metode empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Meskipun Kota Batam mengemban status sebagai wilayah FTZ, penerapan SNI tetap dibutuhkan. Hal tersebut disebabkan karena SNI diterapkan untuk melindungi dan menjamin keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, masih terdapat banyak hambatan bagi UMKM dalam menerapkan SNI mainan secara wajib, diantara lain tidak terdapat Lembaga Sertifikasi Produk di Kota Batam, biaya sertifikasi yang mahal, jangka waktu sertifikat yang pendek, serta perlakuan diskriminatif terhadap pelaku UMKM yang menyebabkan tidak mungkin diterapkannya SNI mainan secara Wajib oleh pelaku UMKM. Untuk itu diperlukan suatu peraturan SNI mainan secara Wajib yang diberlakukan secara khusus terhadap pelaku UMKM di Kota Batam, sehingga tujuan penerapan SNI mainan secara wajib dapat tercapai.

Kata Kunci: Standar Nasional Indonesia, Mainan, Kawasan Perdagangan Bebas, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

ABSTRACT

ANALYSIS ON APPLICATION OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD REGULATION ON TOY COMPULSORILY FOR MICRO, SMALL, AND MIDDLE BUSINESSES IN BATAM CITY FREE TRADE ZONE, RIAU ISLANDS

By:

Hendra Wijaya

(Thesis Advisor : Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M. Ph.D.)

This research is conducted for meeting two purposes, which are, to know and analyze problem which is faced in applying Indonesian National Standard regulation compulsorily in Batam City Free Trade Zone, Riau Islands. Beside that, likewise to know and analyze the application of Indonesian National Standard on toy compulsorily for Micro, Small, and Middle Businesses in Batam City Free Trade Zone, Riau Islands.

The Research Method which is used within this Legal Writing is the combination between normative and empiric method by utilizing the primary and secondary data. Primary data acquired from interviewing the interviewees and respondent, while Secondary Data acquired from Books Research which includes primary, secondary and tertiary legal sources.

Even though Batam City holds the status as the Free Trade Zone, Indonesian National Standard is still needed to be exercised. It is due to the reason behind exercising Indonesian National Standard is to protect and ensure the safety of the consumers based on the Constitution No. 8 of 1999 with respect to Consumer Security. Nevertheless, there are still a lot of inhibitions, such as lack of Product Certification Institution in Batam City, high certification cost, short certification period, discriminative treatment to Micro, Small, and Middle businessmen, which caused Indonesian National Standard on toy compulsorily being impossible to be applied by the Micro, Small, and Middle businessmen. For that reason, we do require a specific Indonesian National Standard Regulation on toy compulsorily for Micro, Small, and Middle businessmen in Batam City, thus the purpose of exercising Indonesian National Standard on toy compulsorily can be met.

Keywords: Indonesian National Standard, Toys, Free Trade Zone, Micro, Small, and Middle Businesses